



## Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah di Negara Negara Islam

Muflihul Fadhil<sup>1</sup>, Muhammad Aris<sup>2</sup>, Iin Saputra<sup>3</sup>, Murah Syahril<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni 09, 2024

Revised Juni 15, 2024

Accepted Juni 22, 2024

Available online Juni 25, 2024

#### Kata Kunci:

Perbandingan, Kebijakan, Ekonomi Syariah.

#### Keywords:

Comparison, Policy, Sharia Economy.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Ekonomi islam hadir sebagai harapan baru diberbagai pihak khususnya umat islam, pertumbuhan ekonomi islam telah banyak dipakai di belahan dunia dengan memakai sistem ekonomi berbasis syariah dikebijakannya, dengan memahami perbandingan kebijakan ekonomi syariah di negara-negara Islam, kita dapat mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor keuangan syariah. Ini menjadi penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara Islam. Dalam membandingkan kebijakan ekonomi syariah di beberapa negara ASEAN, Eropa, dan OKI, bahwa tiap negara memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi internal dan eksternalnya. Malaysia dan Indonesia terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah dengan regulasi yang kuat dan infrastruktur keuangan yang matang. Sementara itu, negara-negara Eropa seperti Inggris dan Turki menunjukkan perkembangan pesat dalam sektor ini meskipun masih dalam tahap pengembangan awal. Di sisi lain, negara-negara OKI seperti Arab Saudi dan Pakistan menunjukkan dominasi bank syariah dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, metode mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menelusuri file, website internet, dokumen-

dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini memaparkan tentang bagaimana perbandingan kebijakan ekonomi syariah di negara-negara islam.

### ABSTRACT

Islamic economics comes as a new hope in various parties, especially Muslims, Islamic economic growth has been widely used in many parts of the world by using sharia-based economic systems in their policies, by understanding the comparison of Islamic economic policies in Islamic countries, we can evaluate the successes and challenges faced in developing the Islamic financial sector. This is important for formulating more effective strategies to increase financial inclusion, promote sustainable economic growth, and improve people's welfare in Islamic countries. In comparing the Islamic economic policies in several ASEAN, European, and OIC countries, each country has a different approach according to its internal and external conditions. Malaysia and Indonesia are leading the development of Islamic economics with strong regulations and mature financial infrastructure. Meanwhile, European countries such as the UK and Turkey are showing rapid development in this sector although it is still in the early stages of development. On the other hand, OIC countries such as Saudi Arabia and Pakistan show the dominance of Islamic banks and rapid economic growth. The method used in this research is descriptive analysis, a method of collecting data by browsing files, internet websites, documents and information related to the object of research. This research describes how the comparison of Islamic economic policies in Islamic countries.

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Muslim di berbagai negara dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keuangan berbasis syariah telah mendorong permintaan yang signifikan terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Sebagai contoh, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Pakistan memiliki populasi Muslim yang besar dan semakin meningkatkan permintaan akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menciptakan tekanan bagi pemerintah dan regulator untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah.

Dalam menghadapi tantangan global seperti ketidakstabilan ekonomi, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan sosial, ekonomi syariah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip keuangan syariah yang mendorong

\*Corresponding author

E-mail addresses: [muflihulfadhil2002@gmail.com](mailto:muflihulfadhil2002@gmail.com), [Muhammadaris260899@gmail.com](mailto:Muhammadaris260899@gmail.com), [iinsaputra07@gmail.com](mailto:iinsaputra07@gmail.com), [syahrilisyahdan@gmail.com](mailto:syahrilisyahdan@gmail.com)

keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di negara-negara Islam.

Perbandingan kebijakan ekonomi syariah di berbagai negara Islam menunjukkan variasi yang signifikan dalam pendekatan dan implementasi kebijakan. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia telah menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi syariah dengan mengadopsi regulasi yang komprehensif dan mengembangkan infrastruktur keuangan syariah yang matang. Namun, di sisi lain, negara-negara seperti Singapura dan Thailand, meskipun memiliki populasi Muslim yang lebih kecil, juga telah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan sektor keuangan syariah sebagai bagian dari upaya mereka untuk menarik investasi internasional.

Sementara beberapa negara Islam telah membuat kemajuan signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang produk dan layanan keuangan syariah di kalangan masyarakat. Edukasi dan literasi keuangan yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi, penting bagi negara-negara Islam untuk memperkuat kerja sama regional dan internasional dalam mengembangkan ekonomi syariah. Kerja sama antarnegara dapat meningkatkan akses terhadap pasar keuangan syariah global dan memperluas peluang investasi serta pertumbuhan ekonomi.

Dengan memahami perbandingan kebijakan ekonomi syariah di negara-negara Islam, kita dapat mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor keuangan syariah. Ini menjadi penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara Islam. Oleh karena itu penelitian ini memaparkan tentang bagaimana Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah Di Negara-Negara Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian Studi Pustaka adalah metode mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menelusuri file, website internet, dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dan dengan dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan. (Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, dkk, 2018)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah di Asean**

#### **1. Indonesia**

Kebijakan ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang seiring dengan upaya negara untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Bank Indonesia telah menerbitkan Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023, yang memberikan gambaran holistik tentang capaian, pembelajaran, dan arah kebijakan ke depan. Fokus utama adalah pada sinergi ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan dan memacu kebangkitan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Rencana Induk Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) sebagai arah strategis pengembangan keuangan syariah di negara ini. Selain itu, ada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang diluncurkan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Untuk mencapai visi tersebut, Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, termasuk:

- Penguatan Halal Value Chain: Fokus pada sektor-sektor yang potensial dan berdaya saing tinggi untuk memperkuat rantai nilai halal.
- Penguatan Sektor Keuangan Syariah: Melalui Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang telah disempurnakan.
- Penguatan UMKM: Sebagai penggerak utama halal value chain, dengan peningkatan kapasitas dan daya saing usaha.
- Penguatan Ekonomi Digital: Khususnya di bidang e-commerce dan fintech, untuk mendorong pencapaian strategi lainnya.

Regulasi dan Pemerintah Indonesia juga sangat aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur dan mengawasi industri keuangan syariah. Beberapa regulasi penting termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dibidang Industri Indonesia memiliki potensi besar dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya terus berkembang. Namun, pasar modal syariah dan takaful masih perlu dikembangkan lebih lanjut.

## 2. Singapura

Perkembangan ekonomi Islam di Singapura mengandung dua hal yang amat mendasar, pertama adalah tumbuhnya ekonomi Islam yang progresif dalam persaingannya dengan ekonomi konvensional. Kedua adalah tantangan maupun kontestasi nilai ideologis ekonomi Islam sebagai ekonomi alternatif di tengah keterpurukan sistem ekonomi kapitalisme. Penerapan Ekonomi Islam di Singapura berkembang pesat diawali dengan dibukanya Islamic Window pada bankbank tertentu serta kemudahan regulasi yang diberikan oleh Monetary Authority Of Singapore (MAS) terbukti dengan didirikannya Islamic Bank of Asia di Singapura atas persetujuan MAS. Sistem ekonomi Singapura yang campuran antara kapitalis dan sosialis sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonominya, kontrol pemerintah dan penerapan sistem pasar bebas adalah kekuatan utama ekonomi negara Singapura. Untuk memperluas jaringan kerjasama ekonomi, pemerintah Singapura menciptakan keseimbangan antar para investor lokal maupun asing dalam hal investasi asing. Singapura juga memiliki kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah, dimana Singapura dituntut untuk bekerjasama berdasarkan hukum Islam. Pemerintah Singapura semakin serius memantau perkembangan sistem ekonomi Islam dengan berhasilnya SWF, FDI, Petrodolar yang kemudian menarik minat bisnis yang tinggi dalam ekonomi Islam di Singapura. Berkembangnya Sektor Perbankan Islam, Kebijakan Singapura untuk menjadi pusat industri keuangan Islam (Islamic Financial) ternyata tidak main-main untuk mencenangkan tekadnya tersebut.

Negara dengan penduduk dan pemerintahan yang mayoritas non-Muslim menempatkan diri sebagai pusat pengelola dana-dana Syariah dengan sistem Islam. Apalagi pada saat ini, Singapura terkenal sebagai negara yang secara keseluruhan berkiblat kepada barat. Sistem ekonomi Islam cukup berhasil ditetapkan oleh Singapura, terbukti dengan didirikannya Islamic Bank Of Asia pada tahun 2007 dengan kemudahan proses regulasi yang diberikan oleh MAS. Sistem ekonomi Islam dalam perbankan syariah semakin berkembang pesat di Singapura, yang ditandai dengan kemunculan bank syariah internasional maupun bank konvensional Singapura yang mendirikan cabang khusus syariah maupun menyediakan layanan perbankan syariah seperti bank DBS, Maybank, HSBC Amanah, OCBC Bank dan Noor Ilamic Bank. Keberadaan bank Internasional ini dapat dipahami sebagai ketertarikan investor pada pasar keuangan dan jasa berbasis Islam di Singapura. Perbankan Islam di Singapura disusun secara terencana dan berhati-hati untuk mempercepat pembangunan ekonominya. (Nur Hilda Mardiah, 2016)

Regulasi dan Pemerintah: Singapura tidak memiliki populasi Muslim yang besar, tetapi negara ini tetap mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah untuk menarik investasi internasional. Monetary Authority of Singapore (MAS) mengatur industri ini.

Industri: Singapura fokus pada produk investasi syariah dan pengelolaan kekayaan (wealth management) syariah. Negara ini menjadi pusat keuangan syariah untuk pasar internasional, terutama untuk sukuk dan manajemen dana syariah.

## 3. Thailand

Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, yaitu kerajaan Sukhotai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan mempunyai wilayah kekuasaan yang lebih besar dibandingkan Sukhotai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa Negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16. Meski mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satusatunya Negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh Negara Eropa. Namun demikian, pengaruh Barat termasuk ancaman kekerasan mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania. (Muhammad Fadhlil Afif dkk, 2013) Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan perubahan bentuk Negara menjadi monarki konstitusional. Negara yang semula dikenal dengan nama Siam ini, mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang, tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an. Kemunculan Islam di Thailand, ada semenjak zaman Sukhothai melalui pedagang Arab, kemudian pada era Rattanakosin, Islam berkembang ke rantau dan bagian-bagian lain di negara ini. Islam merupakan penduduk minoritas yang terdapat di tiap-tiap wilayah di Thailand, namun mayoritas Islam terdapat di empat wilayah, yaitu Sempadan Thai, Iaitu Pattani, Yala, Naratiwat, Satun dan empat daerah di Songkhla. Yang memainkan peran dalam memberikan keputusan dan kebijaksanaan dalam urusan agama adalah Chularachamontri. Selain itu di setiap wiayah terdapat Majelis Agama Islam, yang mempunyai otoritas dalam menetapkan hukum-hukum Islam, seperti muncul dan hilangnya Hilal, penetapan Hari Raya dan labelitas makanan halal.

Kesadaran umat Islam di selatan Thailand yang semakin meningkat, menyebabkan timbulnya kemauan untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari

beberapa organisasi pelajar Islam di beberapa kampus, banyak akademisi, eksekutif perniagaan, serta para Imam masjid yang giat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan tentang perbankan Islam dan atau perbankan tanpa riba. Kegiatan tersebut kemudian mengalami masalah dikarenakan tidak adanya dukungan dari kerajaan dan tidak adanya peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengatur keabsahan perbankan Islam. Dan masalah tersebut dilengkapi dengan tidak dikuasainya ilmu pengetahuan tentang perbankan Islam oleh sektor swasta dan sumber keuanganpun kurang. Walaupun PP dan UU belum diterbitkan, namun pada masa itu, sudah ada Institusi Keuangan seperti, Tabungan Zakat dan Dana Amal Chularachmontri, Koperasi Ibnu Affan, Koperasi Islam Pattai Berhad, Tabung Haji. Penerapan Sistem Syariah dilaksanakan pada Bank Sri-Nakhon. Bank ini merupakan bank kerajaan yang mulai beroperasi pada 21 Agustus 1950, yang diresmikan oleh Field Marshal Plaek Phibunsongkhram, selaku perdana menteri pada saat itu. Bank ini merupakan bank konvensional yang menerapkan dual bank sistem, yang kemudian membuka perbankan Islam yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 1997. Namun tidak bertahan lama perbankan Islam ini ditutup dikarenakan terjadinya krisis keuangan. Sehingga menteri keuangan mengisyaratkan agar Bank Sri-Nakon dialihkan menjadi Bank Nakhonlung Thai (Siam City Bank Public Company Limited) pada 29 Maret 2002.

Government Saving Bank (OM-Sin), juga merupakan jenis bank konvensional yang menerapkan dual Bank System sehingga membuka "Perkhidmatan Sistem Keuangan Islam" pada 5 wilayah Sempedan Selatan Thailand pada tahun 1997, sehingga berkembang sampai daerah Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Bangkok kawasan NongChok. 24 Penerapan Unit perbankan Islam pada Bank Krung Thai, bank ini mulai beroperasi pada tanggal 14 maret 1966, bank ini merupakan gabungan dari dua bank konvensional yaitu Agricultural Bank dan Monton Bank Limited. Keuangan Islam pada bank ini disebut dengan nama KTB Syariah. Pembentukan lembaga ini terbentuk dari permintaan masyarakat Islam dan polisi kerajaan, sehingga pada tahun 2002 Bank Krung Thai PCL berhasil menumbuhkan satu sistem perbankan Islam yang di namakan "Krung Thai Syariah" (Syariah Banking Service) pada daerah yang berpenduduk Islam. Adapun akad yang ditawarkan adalah Akad Simpan Pinjam atau Tabungan, pembiayaan dan pinjaman yang berbentuk Murobahah, Mudhorobah, Bae' Bit Tsaman, Bae' Murobahah dan juga pembiayaan tabung haji dan Umroh. Setelah berjayanya perbankan Islam pada Bank Krung Thai PCL ini, akhirnya berpindah ke Bank Islam Thailand pada 9 November 2005. Pertumbuhan Islamic Bank of Thailand (IBANK).

Umat Islam yang tinggal di bagian selatan negara Thailand, membutuhkan produk-produk perbankan yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Untuk mendirikan perbankan yang bebas dari bunga, diperlukan usaha-usaha yang tidak gampang. Pada tahun 1994, kerajaan Thailand menandatangani kerjasama dalam bidang pembangunan ekonomi dengan negara Malaysia dan Indonesia. Dimana Thailand sebagai penanggungjawab atas pembangunan yang disediakan pada lima wilayah selatan Thailand. Oleh karena itu, Kerajaan Thailand mendirikan perbankan Islam sebagai alternatif keuangan bagi mayoritas penduduk muslim. Hal itu di dorong dengan pelantikan lembaga pembangunan ekonomi dan sosial, serta membuat kajian-kajian ekonomi. Sampai pada saat ini, IBANK merupakan salah satu bank yang menerapkan Prinsip Syariah pada produk-produk yang ditawarkannya. Sehingga IBANK berhasil mendirikan cabang-cabangnya di daerah selatan bahkan di luar daerah tersebut. Produk-produk yang ditawarkan IBANK meliputi pembiayaan Polisi, Pembiayaan Akar Umbi IBANK, Pembayaran hutang untuk para petani, Pembiayaan buruh kerja Thai di Malaysia, pembiayaan gerai penjajah dan pekerjaan bebas, pembiayaan Re-Finance hutang luar biasa, Pembiayaan Perusahaan Kecil. (Nur Kholis, 2017)

Regulasi dan Pemerintah: Thailand telah mengembangkan kebijakan untuk mendukung keuangan syariah, meskipun dengan skala yang lebih kecil dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Bank of Thailand mengawasi sektor ini. Industri: Thailand memiliki beberapa bank dan perusahaan asuransi syariah, terutama berfokus pada wilayah dengan populasi Muslim yang besar seperti di provinsi selatan.

#### **4. Malaysia**

Perbankan Islam tumbuh layaknya perbankan konvensional di negeri jiran. Tahun 1963 adalah awal diperkenalkannya sistem keuangan Islam di Malaysia, yang berbentuk lembaga, lembaga itu dikenal dengan nama Lembaga Tabung Haji. Berbekal dari lembaga inilah, kemudian pada era tahun 1970-an banyak yang menyerukan agar didirikannya Bank Islam di Malaysia, oleh para intelektualnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan kaum Muslimin di Malaysia. Sebagai jawaban dari seruan tersebut, pemerintah Malaysia menunjuk suatu komite yang ditugaskan untuk mempelajari pengoperasian Faisal Islamic Bank of Egypt dan Faisal Islamic Bank of Sudan. Hasil dari tugas tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah Malaysia, diantaranya usulan agar didirikan Bank berbasis syariah di Malaysia yang dimasukkan sebagai perusahaan di bawah Companies act 1965 dan agar setiap bank mempunyai Dewan pengawas Syariah (Syariah Supervisory Board), sebagai pengawas kegiatan bank. (Sultan Remi Sjahdeini, 2014) Setelah terbentuknya undang-undang yang menegaskan tentang regulasi yang wajib dipatuhi oleh bank-bank Islam di Malaysia yaitu, The Islamic Banking Act 1983. Dan pada tahun yang sama Government

Investment Act 1983 diundangkan, yang kemudian pemerintah Malaysia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Government Investment Certificates berbasis syariah.

Bank Islam kemudian mempunyai legalitas untuk beroperasi, adapun Bank Islam yang pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Juli 1983 adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), didirikan pada tanggal 1 Maret 1983. BIMB pun mempunyai anak perusahaan yang terdiri atas Syarikat Al-Ijarah Sendirian Berhad (Perusahaan Leasing), Syarikat AlWakalah Nominee Sendirian Berhad (yang menawarkan jasa-jasa nominee) dan Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad (Perlindungan Asuransi Umum dan Keluarga). Setelah beberapa dekade Pemerintah Malaysia menyetujui berdirinya bank Islam kedua pada tanggal 1 Oktober 1999 yaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad. Bank ini terbentuk dari kombinasi antara Bank Bumi Putra Malaysia Berhad dan Bank of Commerce Malaysia Berhad. Sedangkan Bank Negara Malaysia yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan bank Islam dan bank konvensional memilih untuk menganut dual banking system, setelah di undang-undangkannya Islamic Banking Act. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia untuk memajukan dan menjadikan Perbankan Islam sejajar dengan bank konvensional, Perbankan Islam mengeluarkan 21 produk yang dikenalkan pada awal tahun 1993 dan 4 Maret 1994, Bank negara Malaysia mengeluarkan skim (Interest-free Banking Scheme), melalui skim ini perbankan nonsyariah diperbolehkan menawarkan jasa dan produk perbankan Islam. Dan pada tanggal 1 Mei 1997 Bank Negara Malaysia mendirikan the National shariah Advisory Council on Islamic Banking and Takaful (NSAC). Pada tahun 2010 diharapkan Perbankan Islam dan Takaful mempunyai fitur-fitur. Diantara fitur tersebut adalah menjadikan Malaysia sebagai pusat keuangan Islam secara regional. Untuk mewujudkan hal itu, Malaysia mengabulkan permohonan dari tiga lembaga perbankan Islam asing untuk beroperasi di Malaysia yaitu, Kuwait Finance House, Al Rajhi Banking and Investment Corporation (Saudi Arabia), Qatar Islamic Bank, RSUD Investment Bank Inc., Global Investment House dan Asian Finance Bank.

Regulasi dan Pemerintah: Malaysia adalah salah satu negara terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah. Bank Negara Malaysia (BNM) dan Securities Commission Malaysia (SC) memainkan peran penting dalam pengaturan dan pengawasan keuangan syariah. Negara ini memiliki undang-undang khusus, seperti Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA).

Industri: Malaysia memiliki ekosistem keuangan syariah yang matang dengan banyak bank syariah, takaful (asuransi syariah), dan pasar modal syariah. Negara ini juga menjadi pusat global untuk sukuk (obligasi syariah).

## **5. Brunei Darussalam**

Negara ini tergolong mempunyai jumlah perbankan yang banyak. Dari jumlah yang banyak itu, hanya ada dua perbankan yang menawarkan jasa-jasa perbankan Syariah, yaitu Islamic Bank of Brunei (IBB) dan Tabungan Amanah Islam Brunei (TAIB). Tumbuh dan berkembangnya ekonomi Islam di Brunei Darussalam, ditandai dengan berdirinya TAIB pada tahun 1992. Dan yang kedua adalah IBB yang didirikan pada tahun 1993 menggantikan posisi International Bank of Brunei. TAIB adalah lembaga milik pemerintah yang tujuan utamanya adalah menawarkan jasa-jasa keuangan Islam dan meningkatkan status sosio-ekonomi penduduk Brunei. Dan IBB melaksanakan kegiatan tabungan dan keuangan berdasarkan hukum Islam. Kedua bank ini terintegrasi menjadi satu pada tanggal 2016 menjadi Bank Islam Brunei Darussalam Bhd (BIBD), hal ini dilakukan demi memperkuat lembaga keuangan Islam di negara ini. Dari total aset yang dimiliki oleh kedua bank (BND770 juta) pada tahun 1993, meningkat menjadi BND5 miliar pada tahun 2006. Pada tahun 2009 dana tabungan meningkat menjadi BND3 miliar sedang pembiayaan meningkat kurang lebih mencapai BND4, 5 miliar. Pada tanggal 3 Januari 2006, BIBD resmi beroperasi. BIBD memiliki 14 cabang di semua distrik dan 11 cabang terletak di Brunei Muara, satu cabang di Tutong, dua cabang di Kuala Belait dan satu cabang di Temburong.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BIBD dan jabatan yang diperolehnya adalah, BIBD meluncurkan Electronic Kad Inden menggantikan Government Manual Kad Inden. Dengan munculnya Electronic Kad Inden, kantorkantor pemerintah dapat membeli bahan bakar dan produk-produk lain yang tersedia di stasiun-stasiun Bahan Bakar (SPBU) di Negara ini. Untuk meluncurkan produk ini, BIBD bekerjasama dengan Brunei Shell Marketing (BSM), Ministry of Development and Ministry of Finance. BIBD juga meluncurkan BIBD Musyarakah Musawwamah dan Al-Bai Tradable Musyarakah certificate. Produk ini merupakan jenis sertifikat, dimana masyarakat dapat berinvestasi berdasarkan prinsip syariah. BIBD juga meluncurkan BIBD Kad M, produk ini merupakan sejenis kartu yang digunakan dalam transaksi pembelian bahan bakar, sehingga pembayaran tidak dilakukan secara tunai. Dan adapun untuk pembelian rumah dengan harga miring BIBD bekerjasama dengan Supercrete Trading Sdn. Bhd, dengan memperkenalkan BBA Baiti Financing. Pada tanggal 23 Agustus 2006, BIBD ditunjuk menjadi Underwrite dan lead arranger untuk sukuk al-Ijarah oleh Brunei LNG Sdn. Dan menteri keuangan juga telah menunjuk BIBD sebagai lead manager untuk sukuk al-Ijarah.

Regulasi dan Pemerintah: Brunei memiliki kebijakan yang sangat mendukung ekonomi syariah, dengan regulator utama adalah Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD). Brunei juga mengadopsi Common Reporting Standard (CRS) untuk keuangan syariah.

Industri: Keuangan syariah di Brunei mencakup perbankan syariah, takaful, dan dana investasi syariah. Meskipun skalanya lebih kecil dibandingkan Malaysia dan Indonesia, sektor ini sangat teratur dan terintegrasi dengan kebijakan nasional.

Jadi dapat disimpulkan negara-negara ASEAN memiliki pendekatan yang beragam terhadap ekonomi syariah, yang mencerminkan perbedaan dalam populasi Muslim, kebijakan pemerintah, dan tingkat perkembangan industri keuangan syariah. Malaysia dan Indonesia memimpin dengan ekosistem yang lebih matang dan regulasi yang komprehensif, sementara negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Thailand berfokus pada niche market dan menarik investasi internasional.

### Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah di Eropa

Munculnya ekonomi syariah di daratan benua Eropa dimulai dari negara Inggris, yaitu pada akhir tahun 1970 hingga awal tahun 1980. Tepatnya Tahun 1976, setelah konferensi internasional pertama tentang Ekonomi Islam, yang diadakan di Makkah Al-Mukarromah, Yayasan Islam Leicester United Kingdom mendirikan pusat penelitian pertama ekonomi Islam. Pusat Penelitian ini berkembang menjadi Pusat Penelitian Ekonomi Islam Internasional atau The International Centre for Research Islamic Economics di Universitas King Abdul Aziz pada tahun 1977. Yayasan Islam Inggris kemudian menerbitkan karya-karya besar oleh pelopor ekonomi, perbankan dan keuangan Islam seperti Nejatullah Siddiqi, Umer Chapra dan lain-lain. Dalam hal ini juga diselenggarakan konferensi, seminar dan lokakarya, tentang topik tersebut. bekerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB), The Islamic Research and Training Institute (IRTI), dan Universitas Loughborough. (Ahmed Belouafi, Abdel Kadir Chachi, 2014)

Pertumbuhan keuangan Islam di Eropa ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan Islam dan instrumennya yang tumbuh secara pesat di Eropa, antara lain. (Ahmad Irvani, 2016)

1. **Perbankan Syariah** Bank di Eropa yang secara operasional berbasis syariah berjumlah 6 Bank di Inggris, yaitu Bank of London and the Middle East (BLME) dengan total aset sebanyak \$2,149 Milyar, Al-Rayyan Bank dengan total aset sebanyak \$1,005 Milyar, Gatehouse Bank dengan total aset sebanyak \$0,409 Milyar, Qatar Islamic Bank United Kingdom (QIB UK) dengan total aset sebanyak \$0,35 Milyar, European Islamic Investment Bank dengan total aset sebanyak \$0,214 Milyar, dan Abu Dhabi Islamic Bank United Kingdom (ADIB UK) dengan total aset sebanyak \$0,146 Milyar. Adapun bank konvensional yang membuka Islamic windows untuk melayani produk keuangan syariah sebanyak 16 Bank, yaitu ABC International Bank, Ahli United Bank, Bank of Ireland, Barclays, BNP Paribas, Bristol & West, Citi group, Deutsche Bank, IJB International London, J Aron & Co, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered, United National Bank.
2. **Pasar sukuk** merupakan bagian penting dari pasar keuangan Islam dan London sebagai Sentral obligasi internasional. Inggris merupakan negara barat pertama yang menerbitkan obligasi syariah atau sukuk. Sukuk berdasarkan kontrak Ijarah yang disokong oleh tiga aset pemerintahan pusat Inggris dan terdaftar di London Stock Exchange (LSE) yang mengenalkan indeks syariah. Sukuk ini sangat diminati oleh masyarakat dengan dibuktikannya banyak permintaan dan pesasan. Alokasinya dibuat untuk berbagai investor seperti dana pengembangan kekayaan negara, bank sentral, dan lembaga keuangan domestik maupun internasional. LSE merupakan pusat penerbitan sukuk, terdaftar di LSE dengan nilai total \$51 Milyar.
3. **Takaful** Di Eropa, negara Inggris merupakan pelopor pengembangan asuransi Syariah, melalui HSBS's Amanah, Inggris bercita-cita menjadi leading sector, bagi pengembangan asuransi syariah di Eropa dan negara lainnya. International Co-operative and Mutual Insurance Faderation (ICMIF), yang menghimpun 150 orang dari 82 anggota organisasi dari 52 negara di dunia. Lembaga ini bertujuan untuk memajukan dan memperkenalkan sistem asuransi syariah ke berbagai negara. Di Amerika Serikat, asuransi Syariah pertama kali berdiri pada Desember 1996. Takaful USA Insurance Company, asuransi pertama di Amerika didirikan untuk menampung sedikitnya 12 juta penduduk Muslim di Amerika. (Mohammad Atho Mudzhar, Muhammad Maksun, 2017)

Pertumbuhan asuransi syariah ini menunjukkan respon yang positif dari masyarakat Eropa terhadap sistem asuransi berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah dapat diterima dan menjadi alternatif bagi sistem asuransi yang bertahan selama ini.

Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis memiliki kesamaan bahwa keduanya menolak sistem ekonomi Sosialisme. Kedua sistem ini mendukung kebebasan individu dan hak milik pribadi dalam meningkatkan pertumbuhan. Islam menekan akumulasi dalam bentuk komoditas yang bisa dipertukarkan dari dinamika kemajuan ekonomi keseluruhan. Keduanya mengecam feodalisme sebagai anti kemajuan dan setuju dengan struktur sosial yang bisa berubah-ubah. (Syed Nawab Naqvi, 2009)

Banyak perbedaan pada pandangan etika dari kedua sistem tersebut. Para pendukung kapitalisme bersikukuh pada kebebasan moral perilaku mementingkan diri sendiri. Ekonomi Islam tidak akan menerima kedaulatan yang tak dapat diganggu-gugat dari perilaku mementingkan diri sendiri dalam dunia ekonomi. Dengan demikian bertentangan dengan konsep kepemilikan kapitalisme yang berhubungan dengan kepemilikan kekayaan pribadi. Islam menekankan sifat lebih banyak memberi. Karena sifat ini lebih menunjukkan sifat etika Islam, bahwa semua kekayaan milik Allah. Dzat yang menghendaki bahwa kekayaan seharusnya dimiliki bersama oleh semua manusia.

Dari sudut pandang Islam, penekanan yang berlebihan oleh kapitalisme terhadap nilai-nilai material merusak keseimbangan antara perilaku ekonomi dan etika Islam. Dalam kapitalisme perilaku memaksimalkan self-interest secara individual menggantikan sistem nilai apapun yang berharga, khususnya yang didasarkan pada agama. Sebaliknya dalam Islam, desakan menimbun kekayaan dikurangi berdasarkan nilai-nilai manusia dan dalam suatu visi menitikberatkan pada nilai-nilai moral.

Berlawanan dengan sanksi moral kapitalisme terhadap tindakan menimbun kekayaan tanpa pembatasan yang jelas, Islam dengan jelas mengakui bahwa sebagian dari kekayaan seseorang adalah milik orang miskin. Dalam hal ini Islam menghendaki perbaikan hingga orang miskin mendapatkan haknya. Islam mengakui perbedaan kontribusi kerja dan kapasitas intelektual, tetapi Islam membatasi pembelanjaan kekayaan dan juga surplus pendapatan yang berasal dari produksi barang-barang secara sosial non-profitable.

Kapitalisme juga memaksakan rasa tanggung jawab sosial pada individu melalui kebijakan-kebijakan seperti pajak pendapatan, konsep tanggungjawab sosial tidak menonjol, orang miskin tidak memiliki hak atas kekayaan orang kaya. Islam memiliki teori yang jelas tentang kewajiban-kewajiban sosial individu, bahwa individu diharuskan mengeluarkan sebagian dari kekayaannya sebagai hak masyarakat, yang kaya dilarang menghambur-hamburkan kekayaan. Ini semua khas Islam yang menjadikannya berbeda dengan kapitalis.

Kebijakan ekonomi syariah di Eropa bervariasi secara signifikan antara negara-negara, tergantung pada populasi Muslim, regulasi pemerintah, dan penerimaan masyarakat terhadap keuangan syariah. Berikut adalah perbandingan kebijakan ekonomi syariah di beberapa negara Eropa:

- Inggris  
Regulasi: Diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) dan Prudential Regulation Authority (PRA).  
Industri: Pusat utama untuk perbankan syariah, sukuk, dan manajemen aset syariah di Eropa dengan beberapa bank syariah penuh.
- Jerman  
Regulasi: Diatur oleh Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) tanpa regulasi khusus untuk keuangan syariah.  
Industri: Pasar keuangan syariah berkembang dengan beberapa bank syariah, seperti KT Bank AG, tetapi masih dalam tahap awal.
- Prancis  
Regulasi: Diatur oleh Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) tanpa dukungan khusus untuk keuangan syariah.  
Industri: Pasar kecil dengan minat yang meningkat, tetapi belum ada bank syariah penuh.
- Turki  
Regulasi: Diatur oleh Badan Pengatur dan Pengawasan Perbankan (BDDK) dengan dukungan pemerintah yang kuat.  
Industri: Pasar terbesar di wilayah Eropa untuk keuangan syariah dengan beberapa bank syariah besar dan penerbitan sukuk aktif.
- Luksemburg  
Regulasi: Diatur oleh Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) dengan panduan untuk keuangan syariah.  
Industri: Aktif dalam penerbitan sukuk dan manajemen dana syariah, berusaha menjadi pusat keuangan syariah di Eropa.

Jadi dapat disimpulkan, Kebijakan ekonomi syariah di Eropa menunjukkan variasi yang signifikan antara negara-negara. Inggris memimpin dengan regulasi yang mendukung dan industri yang matang, sementara negara-negara seperti Jerman dan Prancis masih dalam tahap pengembangan awal. Turki, meskipun bukan anggota penuh Uni Eropa, memiliki industri keuangan syariah yang berkembang pesat dan dukungan pemerintah yang kuat. Luksemburg juga berusaha menjadi pusat keuangan syariah di Eropa dengan kebijakan yang ramah terhadap investasi syariah.

## **Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah di Beberapa Negara OKI**

### **1. Malaysia**

#### **a. Regulasi yang Kuat**

Malaysia merupakan salah satu negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang memiliki regulasi yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi syariah. (Muhammad, Ulul Azmi, and Nugroho, 2019) Dengan adanya lembaga seperti Bank Negara Malaysia dan Securities Commission Malaysia, negara ini telah berhasil menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah. Semua upaya ini telah membantu Malaysia menjadi salah satu pusat keuangan syariah terkemuka di dunia. Dengan pertumbuhan yang konsisten dalam sektor keuangan syariah, negara ini telah berhasil menarik investor dari seluruh dunia untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan syariah di Malaysia. Dengan demikian, Malaysia terus menjadi contoh sukses dalam mengimplementasikan ekonomi syariah dan menjadi teladan bagi negara-negara lain yang ingin mengembangkan sektor keuangan berbasis syariah.

#### **b. Infrastruktur Keuangan**

Selain itu, adopsi teknologi finansial (fintech) dalam sektor keuangan juga telah membantu mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah di Malaysia. (Syakarna, Nugraheni Fitroh Rezqi, 2023) Dengan semua upaya ini, Malaysia terus menunjukkan komitmennya untuk menjadi pemimpin global dalam ekonomi syariah. Pengembangan infrastruktur keuangan yang kuat di Malaysia telah membuka peluang besar bagi sektor keuangan syariah untuk berkembang pesat. Bank Negara Malaysia, Securities Commission Malaysia, dan Bursa Malaysia telah bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pasar modal syariah. (Fielnanda, Refky 2017) Selain itu, adopsi teknologi finansial (fintech) juga telah memberikan dorongan tambahan bagi pertumbuhan industri keuangan syariah di negara ini. Dengan semua langkah progresif ini, Malaysia terus menegaskan posisinya sebagai pemimpin global dalam ekonomi syariah.

### **2. Indonesia**

#### **a. Dukungan Pemerintah**

Pemerintah Indonesia juga telah memberikan dukungan yang kuat untuk pengembangan industri keuangan syariah. Regulasi yang jelas dan insentif yang diberikan telah memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. (Zelyn, Faizatul, Arta Antri, Huda Qomarul, and Nurrohman, 2024) Sebagai contoh, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang memperbolehkan pendirian bank syariah sebagai instrumen untuk menumbuhkan pasar modal syariah di negara ini. Selain itu, insentif pajak yang diberikan kepada produk keuangan berbasis syariah juga telah mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga aktif dalam mempromosikan produk-produk keuangan syariah melalui berbagai program dan inisiatif. Semua langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian negara. Dengan dukungan pemerintah yang kuat, Indonesia terus menjadi salah satu pusat keuangan syariah terkemuka di dunia. Pemerintah juga telah meluncurkan program-program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah. Selain itu, regulasi yang jelas dan mendukung serta kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat telah menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Dengan adanya komitmen dan kolaborasi yang kuat, diharapkan sektor keuangan syariah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.

#### **b. Literasi Keuangan**

Tidak hanya penting bagi individu untuk memahami produk keuangan syariah, tetapi juga untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang literasi keuangan secara umum. Melalui edukasi dan sosialisasi yang terus menerus, diharapkan masyarakat dapat semakin terampil dalam mengelola keuangan mereka dan memanfaatkan produk-produk keuangan syariah dengan bijak. (Devi, Narulitasari, and Arif Nurohman, 2022) Dengan demikian, tidak hanya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan semakin stabil, tetapi juga kesempatan untuk mencapai keuangan yang sehat bagi semua individu akan semakin meningkat. Dengan adanya literasi keuangan yang tinggi, masyarakat dapat menghindari penipuan investasi dan memahami risiko serta manfaat dari setiap produk keuangan yang mereka pilih. Ini tentu akan berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan, menciptakan lingkungan keuangan yang lebih terpercaya dan berkelanjutan bagi semua.

### **3. Arab Saudi**

#### **a. Dominasi Bank Syariah**

Di Arab Saudi, bank-bank syariah telah menjadi pilihan utama bagi individu yang ingin mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Sidharta, 2017) Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingginya minat masyarakat terhadap produk-produk keuangan berbasis syariah, bank-

bank syariah di Arab Saudi telah berhasil mendominasi pasar keuangan. Hal ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya literasi keuangan dalam mengelola keuangan secara sehat dan berkelanjutan.

Bank-bank syariah di Arab Saudi juga terus melakukan inovasi dalam produk dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. (Abdul, Rachman, Putri Mandiri Dewi, Astuti Widi, and Arkoyah, 2022) Mereka tidak hanya menawarkan produk tabungan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Selain itu, bank-bank syariah juga aktif dalam mendukung program-program keuangan inklusif untuk memastikan akses keuangan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, bank-bank syariah di Arab Saudi tidak hanya menjadi pilihan utama bagi individu yang ingin mengelola keuangan sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi inklusi keuangan dan literasi keuangan di negara tersebut. Dengan adanya bank-bank syariah yang memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat, diharapkan bahwa tingkat literasi keuangan di Arab Saudi akan terus meningkat. Hal ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi individu yang menggunakan layanan perbankan syariah, tetapi juga bagi keseluruhan ekonomi negara. Dengan inklusi keuangan yang merata, diharapkan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari perkembangan sektor keuangan yang berbasis syariah di Arab Saudi.

#### **b. Produk Inovatif bagi**

Salah satu produk inovatif yang telah diperkenalkan oleh bank-bank syariah di Arab Saudi adalah tabungan berbasis syariah yang memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Al, Arif M. Nur Rianto, 2012) Dengan adanya produk ini, masyarakat dapat merasakan manfaat dari investasi yang dilakukan oleh bank-bank syariah tanpa harus khawatir dengan riba atau bunga yang diharamkan dalam Islam. Selain itu, produk inovatif lainnya seperti asuransi syariah dan pembiayaan berbasis syariah juga telah menjadi pilihan yang populer di kalangan masyarakat Arab Saudi yang ingin mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya produk-produk inovatif ini, diharapkan bahwa masyarakat Arab Saudi akan semakin tertarik dan teredukasi tentang pentingnya literasi keuangan dalam menjaga kestabilan keuangan pribadi maupun keluarga. Dengan demikian, bank-bank syariah di Arab Saudi dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen keuangan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, melalui investasi dan produk syariah, masyarakat Arab Saudi dapat merasakan manfaat jangka panjang dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya tahan. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat yang teredukasi tentang literasi keuangan, semakin kuat pula fondasi ekonomi syariah di negara tersebut.

### **4. Pakistan**

#### **a. Perkembangan Pesat**

Pakistan telah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Aryaguna, A., & Windiani, R. (2021) Hal ini tidak lepas dari peran bank-bank syariah yang semakin berkembang di negara ini. Bank-bank syariah di Pakistan telah berhasil menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional, sehingga memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, bank-bank syariah juga telah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Pakistan, dengan menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, bank-bank syariah di Pakistan dapat dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi negara tersebut. Bank-bank syariah di Pakistan juga telah memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dengan menyediakan akses keuangan yang lebih mudah dan sesuai dengan prinsip syariah, bank-bank ini telah membantu menggerakkan sektor ekonomi yang sebelumnya terpinggirkan. Selain itu, keberadaan bank-bank syariah juga telah memberikan dorongan positif bagi inklusi keuangan di Pakistan, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari layanan keuangan yang mereka sediakan. Dengan demikian, bank-bank syariah di Pakistan tidak hanya menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### **b. Inklusi Keuangan**

Dengan semakin banyaknya layanan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat, tingkat inklusi keuangan di Pakistan pun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah rekening bank, pembiayaan mikro, dan investasi yang dilakukan oleh masyarakat. (Wawan, Ichwanudin, 2020) Inklusi keuangan tidak hanya memberikan akses kepada layanan keuangan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan

kesejahteraan ekonomi keluarga. Dengan adanya bank-bank syariah yang beroperasi dengan prinsip inklusi dan keadilan, diharapkan bahwa lebih banyak lagi masyarakat Pakistan dapat merasakan manfaat dari layanan keuangan yang mereka sediakan. Inovasi dalam sektor keuangan seperti layanan perbankan digital juga telah membantu memperluas akses keuangan bagi masyarakat Pakistan yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, program-program pendidikan keuangan juga semakin banyak diselenggarakan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan bahwa inklusi keuangan di Pakistan akan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih luas perekonomian negara tersebut.

## SIMPULAN

Dalam membandingkan kebijakan ekonomi syariah di beberapa negara ASEAN, Eropa, dan OKI, bahwa tiap negara memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi internal dan eksternalnya. Malaysia dan Indonesia terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah dengan regulasi yang kuat dan infrastruktur keuangan yang matang. Sementara itu, negara-negara Eropa seperti Inggris dan Turki menunjukkan perkembangan pesat dalam sektor ini meskipun masih dalam tahap pengembangan awal. Di sisi lain, negara-negara OKI seperti Arab Saudi dan Pakistan menunjukkan dominasi bank syariah dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, sambil terus memperkuat inklusi keuangan dan literasi keuangan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi fokus penting dalam pengembangan ekonomi syariah di seluruh dunia, memperkuat fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, kerjasama antarnegara dalam mempromosikan pendekatan ekonomi syariah dapat menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan sektor ini secara global.

## REFERENSI

- Abdul, Rachman, Putri Mandiri Dewi, Astuti Widi, and Arkoyah. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Siti. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," 2022. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/9505>
- Ahmad Irvani, Inggris sebagai Sentral Keuangan Islam di Barat, *Jurnal Asy-Syar'iyah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, Hlm. 28-30.
- Ahmed Belouafi, Abdel Kadir Chachi, *Islamic Finance In the United Kingdom, Factors Behind Its Development and Growth*, *Journal Islamic Economic Study*, Vol. 22, No.1, May, 2014, hlm. 47-48.
- Al, Arif M. Nur Rianto. "Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis," 2012. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38514/2/Buku\\_Lemb%20Keu%20Sy.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38514/2/Buku_Lemb%20Keu%20Sy.pdf).
- Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, dkk, *Metodologi Penelitian*, Depok : Gunadarma Ilmu, 2018
- Aryaguna, A., & Windiani, R. (2021). Memanfaatkan One Belt One Road: Kepentingan Ekonomi Pakistan dalam China-Pakistan Economic Corridor Tahun 2015-2020. *Journal of International Relations Diponegoro*, 7(3), 87-99. <https://doi.org/10.14710/jirud.v7i3.30676>
- Devi, Narulitasari, and Arif Nurohman. "Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlanjutan Umkm Disolo Raya Yulfan. "Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlanjutan Umkm Disolo Raya," 2022. <http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/210>.
- Fielnanda, Refky. "konsep screening saham syariah di Indonesia. "Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia," 2017. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alfalah/article/view/255>.
- Mohammad Atho Mudzhar, Muhammad Maksum, *Fikih Responsif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 109.
- Muhammad Fadhil Afif dkk, *Peradaban Islam di Thailand*, (Sekolah Tinggi Negeri Kudus, Jum'at 22 Nov 2013), hlm. 6.
- Muhammad, Ulul Azmi, and Nugroho. "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis Wahyu. "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis," 2019. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/8700>.
- Nur Hilda Mardiah, *kepentingan Ekonmi Politik Singapura Dalam Menerapkan Ekonomi Islam*, (JOM FISIP, Vol.3 No.2- Oktober 2016), hlm 4-5
- Nur Kholis, (2017), *Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia*, Millah : Jurnal Studi Agama, XVII (1), pp. 1-30.
- Sidharta, R. B. F. I. "Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal. "Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal," 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/236655268.pdf>.
- Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014),

hlm. 74-75

Syakarna, Nugraheni Fitroh Rezqi. "Peran Teknologi Disruptif dalam Transformasi Perbankan dan Keuangan Islam di Indonesia. "Peran Teknologi Disruptif Dalam Transformasi Perbankan Dan Keuangan Islam Di Indonesia," 2023.

<https://journal.umpo.ac.id/index.php/MUSYROKAH/article/view/7486>.

Syed Nawab Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 103

Wawan, Ichwanudin. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan (Studi Pada Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan (Studi Pada Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)," 2020.

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRBM/article/view/10332>.

Zelyn, Faizatul, Arta Antri, Huda Qomarul, and Nurrohman. "Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan Dede. "Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan," 2024.

<https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/5792>.